

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* (2010). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.* (2004). Jakarta
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.* (2003). Jakarta
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara.* (2003). Jakarta.
- Bawono, I. R. (2012). *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi).* Salemba Empat.
- Ferryanti, M. Hermanto, Suransi, N. K. (2015). ‘determinan kepatuhan pada ketentuan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada kabupaten/kota di provinsi nusa tenggara barat’. *Jurnal InFestasi Vol. 11, No.2, Desember 2015 Hal. 171 - 185*
- Ghazali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Girsang, H. A. V.& Yuyetta, E. N. A. (2015). ‘ analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada lkpd kabupaten/kota provinsi jawa tengah 2010-2012)’. *Vol. 4. No. 4. 2015 hal. 1-11.*
- Halim, A. & Kusufi, S. M. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat.
- Kasmir. (2012). *Analisis laporan keuangan.* Edisi 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khasanah, N.L., & Rahardjo, S.N. (2014).*Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Journal of Accounting Vol. 3, No. 3.Universitas Dipenogoro.*

- Laswad, etc. (2005). *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy 24. pp 101-121.
- Martani, D., & Lestiani, A. (2012). *Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia*. Global Review of Accounting and Finance Vol. 3.No. 1. March 2012. 67 – 84.
- Martono, N. (2011). *Metode penelitian kuantitatif analisis isi dan analisis data sekunder*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulana, C., & Handayani, B.D. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal.Universitas Negeri Semarang*.
- Nurtari, A. Fadillah, S. & Nucholisah, K. (2016). ‘ analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada lkpd kabupaten/kota provinsi jawa tengah 2010-2012). *Jurnal Akuntansi, Gelombang 1*
- Robbins, W., & Austin K. (1986). ‘*Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assesment of The Appropriateness*’. *Journal of Accounting Research*, Vol. 24, No. 2 (Autumn, 1986), pp. 412-421.
- Setyaningrum, D. & Syafitri, F. (2012). ‘analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan’. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2012, Vol. 9, No. 2, hal 154-170*
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D., & Lesmana, S.I. (2010). ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia’. *Jurnal STIE Bank BPD Jateng Vol. 6 No. 2. Surakarta*.
- Wallyani, G. M. & Mahmud, A. (2015). ‘pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di indonesia’. *Accounting Analysis Journal 4 (2) (2015)*

*Warta BPK Edisi 03-Vol.VI-Maret 2016*

Yusup, J. (2014). ‘Determinan faktor yang mempengaruhi luas cakupan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa barat’. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 1, No. 1. 2014

